

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN BENCANA KELAPARAN OLEH DINAS SOSIAL DALAM MEMENUHI KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN KUYAWAGE KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Ruth Novalia Kogoya
NPP. 31.1059

Program Studi Sumber Daya Manusia Sektor Publik
email : ruthkogoya22@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Aleknaek Martua,M.E

ABSTRACT

Background (GAP): The occurrence of frost events leading to drought has resulted in crop damage and even harvest failures in the affected areas. This has led to famine during drought periods, with some individuals becoming critically ill and even dying. Famine in Kuyuwage District, Lanny Jaya Regency, Papua mountainous province, resulted in at least four (4) deaths and hundreds more directly affected in August 2022. The weather factor, considered as the trigger for this disaster, is a recurring event in Kuyuwage District, Lanny Jaya Regency, signaling a serious issue within the food system in the region. This study aims to describe the supporting factors, barriers, and efforts made to optimize the implementation of famine management policies by the Social Services Office in Kuyuwage District, Lanny Jaya Regency. The research utilizes a qualitative method with an inductive approach and data collection techniques involving observation, interviews, and documentation. **Objective:** This study aims to identify barriers to the formation of Village-Owned Enterprises (BUMKam), analyze efforts that have been made, and explore the prospects of local governments in forming BUMKam. **Method:** This research employs a qualitative method with ASOCA analysis. Data were collected through interviews and documentation from various primary and secondary sources. **Results/Findings:** The research findings indicate that barriers to the formation of BUMKam stem from both internal and external factors, including limited trained human resources, inadequate regulations, political instability or social conflicts, lack of access and infrastructure, and insufficient awareness and interest in entrepreneurship. Despite efforts in socialization, mentoring, and empowerment, these initiatives have not been effectively implemented. **Conclusion:** Better prospects are needed to address these barriers, including enhancing human resource capacity, improving regulations, political stability, infrastructure enhancement, and increasing entrepreneurship awareness.

Keywords: Central Papua, Poverty, BUMKam, Local Government, Entrepreneurship.

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Dengan munculnya peristiwa embun beku tersebut hal ini yang menyebabkan kekeringan, maka di daerah tersebut pun mengalami kerusakan pada tanaman bahkan kegagalan panen dari kebun mereka sendiri. Hal ini telah menyebabkan kelaparan yang melanda

mereka pada masa kekeringan sehingga ada yang kritis bahkan pula ada yang meninggal. Kelaparan di **Kecamatan Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua** pegunungan, menyebabkan setidaknya 4 (empat) orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terdampak secara langsung pada Agustus 2022. Faktor cuaca yang dianggap sebagai pemicu bencana ini, merupakan peristiwa yang berulang melanda di Kecamatan Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya ini menjadi penanda adanya masalah serius dalam sistem pangan di kawasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan factor pendukung, penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penanganan kelaparan oleh Dinas Sosial di kecamatan Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat pembentukan BUMKam, menganalisis upaya yang telah dilakukan, serta mengeksplorasi prospek pemerintah daerah dalam pembentukan BUMKam. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis ASOCA. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber primer dan sekunder. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pembentukan BUMKam berasal dari faktor internal dan eksternal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia terlatih, regulasi yang tidak memadai, ketidakstabilan politik atau konflik sosial, kurangnya akses dan infrastruktur, serta kurangnya kesadaran dan minat kewirausahaan. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan, upaya tersebut belum berjalan efektif. **Kesimpulan:** Diperlukan prospek yang lebih baik untuk mengatasi hambatan ini, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan regulasi, stabilitas politik, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kesadaran kewirausahaan.

Kata Kunci: Papua Tengah, Kemiskinan, BUMKam, Pemerintah Daerah, Kewirausahaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kelaparan merupakan permasalahan global yang sering dihadapi oleh banyak negara, terutama negara-negara berkembang. PBB memiliki tujuan untuk mengatasi masalah kelaparan melalui Sustainable Development Goals (SDGs), salah satunya adalah mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan. Meskipun sudah ada kemajuan dalam mengurangi kelaparan, tantangan masih besar, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan rentan.

Di Indonesia, program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) telah diluncurkan untuk membantu keluarga miskin. Namun, masalah kelaparan masih menjadi perhatian, terutama di daerah seperti Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua Pegunungan. Wilayah ini memiliki potensi dalam pertanian, tetapi infrastruktur masih dalam pengembangan dan akses sulit. Masalah kelaparan di daerah ini diperparah oleh perubahan iklim, seperti embun beku yang sering terjadi.

Musibah kekeringan pada Agustus 2022 telah menyebabkan kelaparan di Kabupaten Lanny Jaya, khususnya di Kecamatan Kuyawage. Fenomena alam seperti embun beku telah merusak tanaman pangan dan menyebabkan kegagalan panen, mengakibatkan krisis pangan dan kelaparan. Masalah ini tidak hanya terjadi sekali, namun telah berulang selama beberapa tahun terakhir.

Ketika bencana kelaparan terjadi, akses ke daerah terdampak seperti Kecamatan Kuyawage menjadi sulit. Masyarakat terdampak membutuhkan bantuan pangan dan pelayanan kesehatan. Pemerintah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua, telah menetapkan status tanggap darurat dan membentuk posko penanganan darurat. Namun, tantangan dalam menangani masalah kelaparan tetap besar, terutama karena akses yang terbatas, keterbatasan sumber daya, dan kondisi alam yang ekstrem.

Implementasi kebijakan penanganan bencana kelaparan oleh Dinas Sosial di Kecamatan Kuyawage dihadapi oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan akses dan koordinasi antar pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, upaya telah dilakukan untuk menyediakan bantuan pangan dan peralatan operasional dalam situasi bencana.

Untuk mengatasi masalah kelaparan ini, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dan masyarakat setempat. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti pembangunan lumbung pangan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian. Dengan demikian, diharapkan masalah kelaparan dapat teratasi dengan lebih efektif di masa mendatang.

Implikasi penelitian ini juga dapat dirasakan secara langsung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya. Dengan memahami faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam penanganan bencana kelaparan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Misalnya, dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan aksesibilitas terhadap daerah yang terdampak, upaya pencegahan dan penanggulangan kelaparan dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Selain itu, temuan dari penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai penghambat implementasi kebijakan, pemerintah dapat melakukan reformasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi risiko kelaparan di masa depan.

Dalam konteks akademis, penelitian ini juga dapat menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dalam bidang kebijakan publik dan ketahanan pangan. Temuan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk menjelajahi topik serupa atau melanjutkan penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan dalam konteks bencana kelaparan.

Dalam penelitian ini rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperkuat sistem penanganan bencana dan ketahanan pangan. Dengan memperkuat pemahaman dan upaya bersama, diharapkan bahwa masalah kelaparan di Kabupaten Lanny Jaya dan daerah lainnya dapat diatasi dengan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat menikmati hidup yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan yang berharga, masih terdapat beberapa kesenjangan masalah yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, dalam konteks penanganan banjir, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menyoroiti peran pemerintah daerah dan badan penanggulangan bencana, tetapi belum banyak yang meneliti peran masyarakat lokal dalam mitigasi bencana. Kesenjangan ini penting karena keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan banjir dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi dampaknya.

Kedua, terdapat kekurangan dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya dalam hal evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan tersebut. Penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pengelolaan RTH memengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal dan ekosistem lingkungan akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keberhasilan kebijakan tersebut.

Ketiga, meskipun transformasi digital semakin banyak diterapkan dalam berbagai sektor pelayanan publik, masih kurangnya penelitian yang mendalam tentang implementasi transformasi digital dalam konteks pelayanan administratif seperti pelayanan nikah di KUA. Penelitian yang fokus pada evaluasi efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna terhadap transformasi digital dalam pelayanan administratif akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang potensi dan tantangan dalam menerapkan teknologi tersebut. Dengan menyoroiti kesenjangan-kesenjangan ini, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik terkait penanganan bencana, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan publik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah memberikan wawasan yang berharga terkait implementasi kebijakan dalam penanganan bencana banjir di berbagai daerah. Sebagai contoh, sebuah penelitian oleh (Angrelia et al., 2020) membahas peran Pemerintah Kota Tangerang dalam penanggulangan banjir pada tahun 2020 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hasilnya menyoroiti pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan BPBD dalam merumuskan strategi yang sigap dalam menghadapi bencana banjir.

Selain itu, penelitian oleh (Baskoro & Hertati, 2022) mengkaji implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa untuk penanganan banjir di Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo. Temuan mereka menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal, terutama dalam hal komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Di sisi lain, penelitian oleh (Marpuah, 2018) mengeksplorasi implementasi transformasi digital pelayanan nikah di KUA Kecamatan Blimbing. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi ini telah sesuai dengan indikator komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, dengan faktor pendukung seperti sistem kepemimpinan dan koordinasi yang baik.

Selain itu, penelitian oleh (Purnama, 2023) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan baik, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti memberikan klarifikasi mengenai fungsi RTH dan meningkatkan perawatannya. Dari penelitian-penelitian ini, dapat ditarik berbagai pembelajaran yang relevan untuk memperbaiki implementasi kebijakan dalam penanganan bencana banjir dan pengelolaan RTH di berbagai daerah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang implementasi kebijakan dalam konteks yang berbeda. Melalui pendekatan yang teliti dan analisis yang mendalam, penelitian ini memperkaya literatur tentang penanganan bencana, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan publik dengan menyoroti aspek-aspek yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya. Dengan menggali peran masyarakat lokal, evaluasi dampak kebijakan pengelolaan RTH, dan penelitian tentang transformasi digital dalam pelayanan administratif, penelitian ini memberikan wawasan baru yang berpotensi mengubah cara kita memahami dan mengelola tantangan-tantangan yang kompleks di bidang tersebut.

Pendekatan interdisipliner dalam penelitian ini memperkuat kebaruan ilmiahnya dengan menyatukan berbagai konsep dan teori dari berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, kebijakan publik, dan teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang masalah yang diteliti, tetapi juga menawarkan kerangka kerja yang dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menyelidiki kompleksitas hubungan antara kebijakan, praktik, dan dampaknya pada tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan implikasi praktis yang penting untuk pengembangan kebijakan dan praktik terkait penanganan bencana, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan publik. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi panduan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam merancang strategi dan intervensi yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, kebaruan ilmiah dari penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi yang langsung dengan upaya-upaya nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam penanganan bencana kelaparan di Kabupaten Lanny Jaya. Pertama, penelitian bertujuan untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik di Kabupaten Lanny Jaya yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan dalam menangani kelaparan. Hal ini mencakup analisis

terhadap berbagai faktor seperti struktur sosial masyarakat, akses terhadap sumber daya, dan dinamika politik lokal yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan program-program pangan.

Kedua, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan yang telah ada dalam penanganan bencana kelaparan di Kabupaten Lanny Jaya. Dengan menganalisis sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam upaya mereka untuk mengurangi risiko kelaparan di wilayah tersebut. Evaluasi ini penting untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan efektif di masa depan.

Terakhir, tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan bencana kelaparan di Kabupaten Lanny Jaya. Dengan mempertimbangkan temuan dari analisis faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem penanganan bencana dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat setempat. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberantasan kelaparan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.

II. METODE

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu penelitian agar memperoleh data yang dibutuhkan secara teratur. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menggali informasi yang mendalam terkait penanganan masalah kelaparan di Kecamatan Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti melalui wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan dokumen resmi (Murdiyanto, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yang berarti penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan informasi yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini dimulai dari pengamatan terhadap kasus-kasus yang spesifik dan kemudian ditarik kesimpulan yang lebih umum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian meneliti dan memecahkan masalah tersebut untuk ditarik kesimpulan secara umum (Rijali, 2019).

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memfokuskan pada karakteristik, konseptualisasi, dan klasifikasi yang jelas untuk memaknai fenomena yang diteliti. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan menguraikan arti data tersebut secara spesifik dari situasi di lapangan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan suatu hal atau keadaan tertentu berdasarkan teori-teori yang telah dikembangkan atau mengeksplorasi hal yang belum banyak tersentuh dalam literatur (Hasibuan et al., 2022).

Untuk mengoperasionalkan konsep penelitian, peneliti menggunakan definisi operasional yang mengatur atribut atau sifat nilai dari objek atau kegiatan yang diteliti. Dalam hal ini, variabel penelitian dioperasionalkan berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Definisi operasional ini penting untuk memberikan kredibilitas pada metodologi penelitian dan memastikan reproduktifitas hasil studi (Sari sasi gendro, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli, seperti wawancara dengan pihak terkait di Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti buku, jurnal, dan arsip tertulis dalam BPBD Provinsi Papua Pegunungan. Dalam hal ini, sumber data utama adalah kata-kata dan informasi dari partisipasi, sedangkan sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi yang diperlukan (Thabroni, 2022).

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk menentukan informan yang dapat memberikan informasi yang relevan. Daftar informan termasuk kepala dinas, sekretaris dinas, tokoh masyarakat, kepala adat, dan tokoh pemuda, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian (Haryono, 2023).

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan langsung dari informan terkait penanganan masalah kelaparan di Kecamatan Kuyawage. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung situasi di lapangan, sementara dokumentasi digunakan untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh. Setiap instrumen ini membantu peneliti dalam pengumpulan dan analisis data (Ulfathin, 2022).

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penampilan data. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian data direduksi untuk memilih hal-hal pokok dan menemukan tema atau pola. Data kemudian ditampilkan dalam bentuk yang mempermudah analisis. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari analisis data yang disajikan secara ringkas kepada pembaca.

Jadwal penelitian disesuaikan dengan kalender akademik tahun ajaran 2023/2024, dimulai dari penyusunan dan pengajuan usulan penelitian hingga pengumpulan data. Lokasi penelitian adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan data yang relevan dan valid untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dalam Menangani Bencana Kelaparan di Kabupaten Lanny Jaya

Dalam menjalankan visi "Terwujudnya Masyarakat Sehat, Mandiri, Sejahtera" yang ditetapkan oleh Dinas Sosial kabupaten Lanny Jaya, serta di dukung oleh peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Lanny Jaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam menangani bencana kelaparan menjadi sangat penting. Salah satu aspek utama dalam implementasi kebijakan tersebut adalah belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Permendagri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam keadaan darurat, seperti bencana alam, operasi pencarian dan pertolongan, serta kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Dalam konteks konkret, gambar 4.5 menunjukkan pemberian bantuan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat yang mengalami kelaparan akibat bencana alam, seperti hujan es yang melanda sejumlah kampung di distrik Kuyawage, kabupaten Lanny Jaya. Upaya-upaya penanganan dampak bencana dilakukan dengan melibatkan tim gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan setempat. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengirimkan bantuan berupa beras dan sembako lainnya, serta menetapkan status tanggap darurat bencana alam. Dalam hal ini, Dinas Sosial juga berperan dalam menyalurkan bantuan sembako dan bahan bangunan kepada masyarakat yang terdampak, dengan harapan dapat meringankan beban mereka.

Penulis menggunakan teori implementasi Edwards III untuk menganalisis tingkat implementasi pelayanan bantuan sosial kepada korban bencana kelaparan di distrik Kuyawage. Berdasarkan teori tersebut, ada empat faktor yang digunakan untuk mengukur implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan komunikasi yang efektif dalam menangani keterlambatan penanganan dan pelayanan, yang telah dilakukan melalui sosialisasi dan transmisi informasi yang jelas kepada masyarakat (Vigo Maicelo et al., 2023).

Selain itu, sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan profesional sangat menentukan keberhasilan dalam penanganan bencana. Begitu pula dengan disposisi para pelaksana kebijakan, yang harus dilandasi dengan sikap yang baik dan komitmen yang tinggi terhadap tugas mereka. Insentif juga dapat menjadi motivasi bagi pegawai dalam meningkatkan kinerja mereka.

Struktur birokrasi juga memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya standar operasional konsep (SOP) yang jelas, proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kerjasama antar instansi terkait juga menjadi kunci dalam penanganan bencana kelaparan, sehingga struktur birokrasi yang kondusif sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam menangani bencana kelaparan di Kabupaten Lanny Jaya telah melibatkan berbagai aspek, mulai dari komunikasi yang efektif, pengelolaan sumber daya yang tepat, disposisi yang baik dari para pelaksana, hingga struktur birokrasi yang kondusif. Dengan demikian, upaya penanganan bencana kelaparan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang terdampak.

Implementasi Kebijakan Dinas Sosial di Kabupaten Lanny Jaya

Implementasi Kebijakan Dinas Sosial di Kabupaten Lanny Jaya telah menjadi fokus utama dalam menjalankan visi dan misi mereka untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Dengan dukungan regulasi yang ditetapkan oleh Bupati Lanny Jaya, implementasi kebijakan tersebut telah diatur dengan baik. Belanja Tidak Terduga, sebagai bagian dari pengeluaran anggaran APBD, digunakan untuk keperluan darurat, termasuk bantuan sosial yang mendesak dan tidak terduga. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 juga mengatur penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat, seperti bencana alam dan kejadian luar biasa.

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan Dinas Sosial terlihat dalam upaya pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam, seperti bencana kelaparan akibat hujan es di beberapa kampung di distrik Kuyawage. Langkah-langkah konkret, seperti menyalurkan bantuan berupa beras dan sembako serta mengirimkan tim kesehatan ke lokasi bencana, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Posko tanggap darurat juga didirikan untuk memfasilitasi penanganan bencana dengan lebih efektif.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan ini adalah faktor komunikasi. Melalui sosialisasi dan transmisi informasi yang jelas kepada pemerintah daerah setempat dan masyarakat, Dinas Sosial berhasil memberikan pemahaman yang baik tentang upaya penanganan bencana. Kejelasan dalam petunjuk pelaksanaan dan konsistensi dalam program bantuan juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah.

Namun, proses implementasi tidak selalu berjalan mulus. Adanya faktor pendukung dan penghambat menentukan sejauh mana keberhasilan kebijakan ini. Faktor seperti sumber daya manusia, jaringan infrastruktur, dan kondisi geografis menjadi pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaannya. Meskipun ada tantangan, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan, seperti dengan memperbaiki jaringan infrastruktur dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Dari penelitian ini, terlihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya telah melakukan upaya nyata dalam implementasi kebijakan penanganan bencana kelaparan. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait, menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan ini dengan efektif. Meskipun masih ada tantangan yang perlu dihadapi, komitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan implementasi kebijakan tersebut tetap kuat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian ini menggambarkan keseluruhan gambaran tentang implementasi kebijakan penanganan bencana kelaparan di Kabupaten Lanny Jaya. Pertama, temuan menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan visi dan misi mereka untuk memberikan pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Langkah-langkah konkret, seperti pendirian posko tanggap darurat dan penyaluran bantuan langsung, menjadi bukti nyata dari upaya yang dilakukan.

Kedua, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor seperti infrastruktur jaringan dan ketersediaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan dengan efektif. Meskipun terdapat tantangan, upaya terus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Ketiga, diskusi temuan utama menyoroti pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Melalui kerjasama yang erat dan pemahaman yang baik tentang kondisi lapangan, implementasi kebijakan dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak. Dengan terus memperbaiki dan meningkatkan strategi implementasi, Dinas Sosial dapat terus menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana kelaparan di Kabupaten Lanny Jaya.

3.6 Diskusi Temuan Menarik

Diskusi temuan menarik dari penelitian ini menyoroti beberapa aspek yang patut diperhatikan dalam implementasi kebijakan penanganan bencana kelaparan di Kabupaten Lanny Jaya. Salah satu aspek yang menarik adalah adanya upaya konkret dari Dinas Sosial dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana. Langkah-langkah seperti pendirian posko tanggap darurat dan penyaluran bantuan secara langsung mencerminkan komitmen nyata untuk memberikan pertolongan yang cepat dan tepat.

Selain itu, temuan mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan juga menarik perhatian. Terlihat bahwa meskipun terdapat tantangan seperti infrastruktur jaringan yang kurang memadai, upaya terus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya fokus pada upaya penanganan langsung, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan.

Selanjutnya, diskusi temuan menarik juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan. Melalui kerjasama yang erat dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan lokal, implementasi kebijakan dapat menjadi lebih

responsif dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari berbagai pihak sangatlah penting dalam memastikan keberhasilan upaya penanganan bencana kelaparan di daerah tersebut.

IV. KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, penelitian ini mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan bencana kelaparan di Kecamatan Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya. Faktor pendukung meliputi penggunaan GPS yang memudahkan pencarian lokasi bencana, keberadaan SOP yang jelas, serta ketersediaan infrastruktur teknologi yang mendukung. Namun, terdapat juga faktor penghambat seperti kesulitan rekrutmen SDM yang kompeten, minimnya pelatihan, kurangnya sarana prasarana, dan keterbatasan anggaran.

Dalam upaya meningkatkan implementasi kebijakan, Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya perlu memperhatikan beberapa saran. Pertama, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan yang lebih baik untuk memperjelas peta dan menentukan titik koordinat bencana dengan lebih akurat. Kedua, diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat tentang penanganan bencana kelaparan, baik secara langsung maupun melalui platform online. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan aksesibilitas informasi dengan meng-upgrade website Dinas Sosial Kabupaten Lanny Jaya agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat serta menerapkan saran-saran yang disampaikan, diharapkan implementasi kebijakan penanganan bencana kelaparan di Kecamatan Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, terbatasnya waktu dan sumber daya mungkin membatasi kedalaman analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan bencana kelaparan di Kecamatan Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya. Selain itu, fokus penelitian hanya terbatas pada sudut pandang Dinas Sosial dan beberapa pemangku kepentingan terkait, sehingga pandangan masyarakat luas mungkin tidak sepenuhnya tercermin. Selain itu, keterbatasan dalam aksesibilitas data dan informasi tertentu dapat mempengaruhi kelengkapan analisis.

Arah Masa Depan Penelitian

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat. Ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan penanganan bencana kelaparan. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperdalam pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan implementasi kebijakan, dengan memperluas kerangka analisis untuk mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya

yang lebih luas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan efektivitas penanganan bencana kelaparan di wilayah tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angrelia, C., Prihata, R., Mubarak, A. C., & Utami, W. K. (2020). PERANAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG DALAM PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BANJIR TAHUN 2020. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.3060>
- Baskoro, A. G., & Hertati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tentang Penanganan Banjir di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1745>
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Marpuah, M. (2018). PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DI KUA PASCA PP 48 TAHUN 2014 PADA KUA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *Al-Qalam*, 24(2). <https://doi.org/10.31969/alq.v24i2.546>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Purnama, I. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Serang. *JIMBA Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(1).
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Thabroni, G. (2022). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). In *Serupa.Id*.
- Ulfathin, N. (2022). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya. In *Edukasi* (Vol. 1).

Vigo Maicelo, N. M., Pizarro Salazar, O., Ordinola Ramírez, C. M., Oc Carrasco, O. J., & Velez Rodriguez, L. E. (2023). Grado de Microfiltración Utilizando Sistemas Adhesivos de Autograbado. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8862

